

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BERBASIS MASYARAKAT KAWASAN WISATA

Nur Asiah¹, Riwan Laraga²

¹Universitas Terbuka Gorontalo, ²BPSDM Provinsi Gorontalo
nur@ecampus.ut.ac.id, riwanlaraga@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat kawasan wisata di Kabupaten Bone Bolango. Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak destinasi wisata darat dan laut yang perlu dikelola sehingga bisa menjadi potensi ekonomi yang strategis. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive pada unsur yang terlibat dalam kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango, yaitu Kepala Bidang Kepariwisata, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, Kepala Desa destinasi wisata, masyarakat, dan pengunjung destinasi wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango telah memiliki berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditujukan pada pengelolaan urusan dan pengembangan pariwisata berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun surat keputusan lainnya sebagai bagian dari derivasi kebijakan. Kebijakan-kebijakan tata kelola pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat sudah dilakukan, namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini karena pelaksanaan kebijakan tersebut masih terbatas pada kegiatan-kegiatan rutin administratif.

Kata Kunci: **Destinasi Wisata, Implementasi Kebijakan, Masyarakat**

ABSTRACT

This research aims to review and analyze how the policy for developing community-based tourist destinations in tourist areas in Bone Bolango Regency is implemented. Bone Bolango Regency is one of the districts that has many land and sea tourism destinations that need to be managed so that they can become strategic economic potential. This research was conducted in 2023 with a qualitative descriptive approach. The sample in this research was taken purposively from elements involved in tourism in Bone Bolango Regency, namely the Head of the Tourism Division, Head of the Tourist Destination Development Section, Village Head of the tourist destination, the community and visitors to the tourist destination. The research results show that Bone Bolango Regency has had various policies issued by the Regional Government aimed at managing tourism affairs and development in the form of Regional Regulations, Regent Regulations, and other decrees as part of policy derivation. Management policies for the development of community-based tourism destinations have been implemented, but they have not yet been implemented optimally. This is because the implementation of this policy is still limited to routine administrative activities.

*Keywords: **Tourist Destinations, Policy Implementation, Community***

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu industri penyumbang devisa negara, yang memberikan sumbangan signifikan pada perkembangan ekonomi dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan berkontribusi terhadap pemasukan daerah (PAD). Pariwisata merupakan salah satu urusan yang kekuasaan pengaturannya berada pada pemerintah. Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan sebuah langkah awal dalam mengelola urusan pariwisata agar segala yang terkait dengan urusan tersebut tertib, dan teratur, serta tersinergi dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Kabupaten Bone Bolango yang terletak di bagian timur dari jazirah daratan Gorontalo memiliki potensi wisata yang unik berupa wisata alam darat dan wisata alam lautan. Potensi ini dijadikan peluang bagi pemerintah daerah guna dikelola dan dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan tata kelola yang bisa melibatkan masyarakat kawasan destinasi wisata sebagai komponen kekuatan ekonomi dan nilai jual destinasi wisata.

Tabel 1. Objek Wisata di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Objek Wisata	Nama Objek Wisata
1.	Wisata Alam	1. Objek Wisata Lombongo 2. Objek Wisata Meranti 3. Objek Wisata Air Terjun Ilohuwa 4. Objek Wisata Benteng Ulantha 5. Objek Wisata Center Point 6. Objek Wisata Hungayono
2.	Wisata Bahari	1. Objek Wisata Olele 2. Objek Wisata Molotabu 3. Objek Wisata Botutonuo 4. Objek Wisata River Tubing Poduwoma 5. Objek Wisata Tubing Ilohuwa 6. Objek Wisata Danau Perintis 7. Objek Wisata Pantai Pinomontiga 8. Objek Wisata Pantai Bindhalaha 9. Objek Wisata Hiu Paua Butubarani
Jumlah		15 Objek Wisata

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Sampai saat ini, pariwisata belum menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama di Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang diberikan kewenangan dalam mengelola destinasi wisata, harus bisa menata kelola potensi wisata yang ada sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi daerah.

Tata kelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango diantaranya adalah dalam bentuk kebijakan dan pengaturan kepariwisataan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Kebijakan pengembangan pariwisata yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango merupakan bentuk dari kebijakan publik.

Menurut Friedrich kebijakan sebagai suatu yang mengarah pada tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu, seraya mencari tujuan untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab, 2021).

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (Agustino, 2020) mengemukakan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Pendapat ini menegaskan bahwa produk kebijakan dalam pelaksanaannya harus menggambarkan keterlibatan berbagai pihak sebagai suatu hubungan yang mutual dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango terkait kepariwisataan harus diimplementasikan. Menurut Grindle keberhasilan kebijakan dalam implementasi diukur dari proses dalam mewujudkan hasil akhir. Selain itu, efektifitas kebijakan dapat dilihat dari keterlaksanaan kebijakan baik dari isinya (*content*) maupun lingkungannya (*context*). Adapun isi kebijakan itu meliputi; 1). Kepentingan kelompok sasaran; 2). Tipe Manfaat; 3). Derajat perubahan yang diinginkan; 4). Letak pengambilan keputusan; 5). Pelaksanaan program; 6). Sumberdaya yang dilibatkan. Sedangkan lingkungannya meliputi; 1). Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; 2). Karakteristik lembaga dan penguasa; 3). Kepatuhan dan daya tangkap.

Secara lebih spesifik pada konteks implementasinya kebijakan akan terfokus pada hubungan-hubungan operasi dari orang-orang baik sebagai sasaran kebijakan atau objek, maupun pelaksana kebijakan. Dalam konteks ini kebijakan akan terlihat sebagai sebuah proses dalam aktivitas tindakan yang melibatkan hubungan berbagai *stakeholder* kebijakan.

Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah harus melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Salah satu bentuk wadah untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subjek atau pelaku kepariwisataan adalah pengembangan desa wisata.

Di samping itu pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pengembangan suatu wilayah (Sinaga, Kariaman., 2021).

Pembentukan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan. Keterlibatan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata

merupakan hal yang penting karena masyarakatlah yang memahami dan menguasai wilayahnya (Elfianita, 2016)

Untuk menjadi destinasi wisata ada 4 komponen yang harus dipenuhi oleh suatu daerah yaitu *attraction, accessibilities, amenities, dan ancillary*. *Attraction* (atraksi) adalah daya tarik yang ditawarkan dari suatu kawasan wisata, seperti keindahan alam, kebudayaan daerah, dan lain-lain. *Accessibilities* (aksesibilitas) merupakan akses transportasi yang tersedia di kawasan wisata. *Amenities* (amenitas atau fasilitas) merupakan akomodasi yang tersedia di kawasan wisata seperti tempat penginapan (hotel, homestay, hoster), rumah makan, fasilitas kesehatan, tempat penjualan souvenir, tempat hiburan, tempat pengolahan sampah/limbah, listrik, air bersih, dll. *Ancillary service* merupakan organisasi kepariwisataan yang dibutuhkan untuk pelayanan wisatawan, seperti asosiasi perhotelan, asosiasi pemandu wisata dan asosiasi biro perjalanan. (Qodriyatun, 2018)

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan semua komponen pariwisata tersebut, sangat penting artinya. Penelitian terkait dengan peran serta masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Fujihasa dkk. dimana menghasilkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi dan pariwisata berkelanjutan pada Desa Panglipularan. (Fujihasa, I. Gede Maharta, Ida Ayu Putri Widawati, 2022)

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Bone Bolango telah diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan lainnya. Wujud dari pelaksanaan kebijakan tersebut, diantaranya adalah dengan dibentuknya Desa Wisata. Namun demikian, di lapangan terlihat masyarakat masih belum maksimal berperan dalam melayani wisatawan yang berkunjung. Masyarakat yang terlibat dalam penyediaan sarana prasarana, serta kebutuhan para wisatawan di lokasi wisata juga masih terbatas.

Sehubungan dengan itu pelaksanaan kebijakan publik yang terkait dengan kepariwisataan perlu dikontrol dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana kinerja dan penerapannya di masyarakat (Widodo, 2021). Penelitian ini akan meninjau dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan dan tata kelola pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat kawasan wisata di Kabupaten Bone Bolango. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat kawasan wisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone Bolango pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berusaha menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci. (Anggito & Setiawan, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah semua unsur yang terlibat dalam

kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, terhadap semua unsur yang terlibat dalam kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango yaitu Kepala Bidang Kepariwisata, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, Kepala Desa destinasi wisata, masyarakat, dan pengunjung destinasi wisata.

Data primer dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui pengamatan lapangan dan wawancara secara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan telaah perundang-undangan, dan dokumen yang terkait dengan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango. Karena merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara naratif (Yusuf, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten Bone Bolango memiliki luas 16,24% dari luas Provinsi Gorontalo. Yang terdiri dari 18 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 160 Desa. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022, dinyatakan bahwa pemerintah akan fokus dalam kebijakan membangkitkan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango dengan mengoptimalkan operasional kawasan pariwisata melalui pengembangan amenities dan keberagaman atraksi yang didukung dengan pembenahan infrastruktur wisata.

Pembangunan objek wisata juga akan terus dilakukan dengan kolaborasi program bersama pemerintah desa yaitu pariwisata desa. (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022, 2022). Disamping itu juga dibentuknya 25 Desa Wisata, yang kini sudah dengan kategori maju, berkembang, mandiri, dan rintisan. (Peraturan Bupati No 16 Tahun 2021 Tentang Kawasan Desa Wisata, 2021)

Desa Wisata yang diteliti dalam penelitian ini adalah 5 Desa Wisata.

Tabel 2. Desa Wisata di Kabupaten Bone Bolango

No	Nama Desa Wisata	Keunikan
1.	Desa Wisata Lombongo	Sumber air panas, kolam renang air dingin, air terjun, Kawasan Penyangga hutan Lindung, Souvenir & Kuliner
2.	Desa Wisata Longalo	River Tubing/Arung Jeram
3.	Desa Wisata Molotabu	Pantai, Perahu Wisata, Kuliner, Kerajinan, Terumbu Karang
4.	Desa Wisata Bututonuo	Pantai Bututonuo, Perahu Wisata, Transparansi Terumbu Karang, Kuliner

5.	Desa Wisata Hiu Paus Botubarani	Hiu Paus (Whalw Shark), Pantai Kurinai, Puncak Botubarani, Terumbu Karang, Kuliner
----	---------------------------------	--

Sumber: Penelitian 2023

Kebijakan Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat

Pada prinsipnya kebijakan pemerintah ditujukan untuk menata, mendorong atau memaksa suatu keadaan tertentu agar kondisinya menjadi tertib dan berkembang secara positif sesuai dengan tatanan moral dan tujuan bersama serta potensi yang ada. Tidak terkecuali kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terkait dengan pengelolaan potensi pariwisata.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang ditujukan pada pengelolaan urusan dan pengembangan pariwisata. Kebijakan tersebut berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun surat keputusan lainnya sebagai bagian dari derivasi kebijakan.

Adapun kebijakan dimaksud sesuai temuan dokumen di lapangan terdiri dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pengembangan Wisata Daerah Kabupaten Bone Bolango 2011-2031, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kawasan Desa Wisata. Disamping kebijakan di atas tersebut, ditemukan pula bahwa adanya kelompok sadar wisata yang anggotanya terdiri dari masyarakat di sekitar destinasi wisata.

PEMBAHASAN

Memperhatikan produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, menunjukkan adanya kinerja yang positif khususnya dalam melahirkan produk hukum terkait penyelenggaraan kepariwisataan. Namun demikian dari sisi kinerja kebijakan itu sendiri belum dapat berbanding lurus dengan capaian kinerja dimaksud.

Merujuk pada teori yang dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa keberhasilan kinerja dari kebijakan publik, pengukurannya tidak hanya sampai pada dikeluarkannya produk kebijakan tersebut. Secara holistik dan linier kinerja sebuah produk kebijakan publik harus dapat dibuktikan dengan capaian-capaian pada tahapan implementasi kebijakan sampai pada evaluasi dan agenda perbaikan bahkan revisi kebijakan.

Grindle berpendapat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan (Tachjan, 2006). Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi.

Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan, dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Bila ditelusuri lebih lanjut, terkait kebijakan penyelenggaraan pariwisata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam konteks pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan dapat dikatakan masih belum efektif. Dari 5 objek wisata yang diteliti, menunjukkan belum diterapkannya kebijakan kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, secara maksimal. Belum maksimalnya penerapan kebijakan kepariwisataan di Bone Bolango selain terlihat dari konsistensi pemerintah dalam penyiapan infrastruktur, juga terlihat pada belum maksimalnya pelibatan masyarakat di kawasan destinasi sebagai salah satu stakeholder ataupun target group kebijakan.

Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila orang-orang yang ada dalam kebijakan baik subjek maupun objeknya aktif dalam operasi kebijakan. Wahab (Wahab, 2021) mengemukakan pendapatnya mengenai perspektif implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan

Lebih lanjut hal ini dialami melalui wawancara dengan unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, diungkapkan bahwa keterbatasan pelibatan masyarakat bukan berarti mengabaikan upaya pengembangan pariwisata di Bone Bolango. Hal tersebut terjadi karena beragamnya harapan kepada kinerja pemerintah dalam memberikan layanan pada berbagai urusan dan aspek sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pengembangan pariwisata ini masih terbatas pada skala kegiatan tertentu. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat ataupun pihak swasta agar pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango akan lebih banyak diperankan oleh masyarakat dan pelaku usaha wisata. Hal yang demikian ini, secara simultan akan dapat menjadi pemicu meningkatnya usaha ekonomi masyarakat khususnya bagi penduduk yang tinggal di sekitar lokasi destinasi wisata.

Berdasarkan uraian di atas, maka selayaknyalah kebijakan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango pada tataran pelaksanaannya harus bisa memperlihatkan kondisi aktifitas dan peran masyarakat dalam kegiatan operasi kepariwisataan. Aktifitas dan peran dimaksud dilakukan secara formal terstruktur maupun non formal. Meskipun demikian, kebijakan dimaksud tidak semata-mata pada subjek maupun objek kebijakan, melainkan nilai-nilai yang dikandung dalam kebijakan

tersebut. Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (Prmono, 2022).

Oleh karena itu efektifitas kebijakan pengembangan pariwisata tidak saja terfokus pada aktifitas orang dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan pengembangan pariwisata harus dapat mengakomodir nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat pengguna wisata maupun masyarakat pelaku usaha wisata, serta masyarakat sekitar kawasan wisata. Hal ini menjadi point penting untuk menghindari benturan nilai dari pihak-pihak yang melakukan aktifitas kepariwisataan.

Hal lain yang berkaitan dengan kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango terungkap dari beberapa responden yang ditemui menyatakan bahwa kebijakan kepariwisataan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango masih terbatas pada kegiatan rutin administratif. Artinya bahwa kebijakan pengembangan kepariwisataan cenderung pada kegiatan formal sehingga aktifitas yang dilakukan masih terbatas pada stakeholders kepariwisataan tertentu.

Kondisi yang demikian mengakibatkan penerapan kebijakan pengembangan pariwisata menjadi kurang maksimal dalam melibatkan masyarakat sebagai basis pengembangan. Masyarakat sebagai bagian dari stakeholder kebijakan pengembangan wisata belum dapat secara maksimal melakukan peran dan aktifitasnya dalam kegiatan kepariwisataan khususnya masyarakat di sekitar wilayah destinasi wisata.

Di samping itu, masyarakat disekitar lokasi wisata belum seluruhnya memahami peran mereka sebagai bagian dari upaya pengembangan wisata baik secara mandiri maupun sebagai kelompok sosial masyarakat yang berada di daerah desitinasi wisata. Kebijakan pembentukan kelompok sadar wisata yang masih terbatas pada kegiatan rutin (formal) dan juga terbatas pada keanggotaan kelompok merupakan indikasi efektifitas kebijakan penyelenggaraan pariwisata belum maksimal.

Pelaksanaan kebijakan efektif apabila operasi kegiatannya menunjukkan hubungan yang tidak didominasi oleh peran pemerintah yang sifatnya administrasi (formal) dan pelaksanaannya menunjukkan adanya aktifitas hubungan yang sangat terbuka (formal dan informal) oleh masing-masing stakeholder kebijakan. Artinya selain dari kebijakan itu sendiri, keberhasilannya akan ditentukan oleh dua unsur lainnya yakni pemerintah selaku stuktur mandatorinya, masyarakat termasuk nilai-nilai yang dianutnya, dan pihak swasta. Grindle (1980) menyatakan tiga faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan adalah sinergi dari tiga variable yakni kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan(Noerbella, 2022).

Dalam pengembangan pariwisata faktor-faktor yang menghambat dikategorikan pada dua faktor besar yakni sumber daya meteril dan non materil. Demikian pula yang terjadi dalam hal pengembangan pariwisata di Kabupaten Bone Bolango. Dalam

pembahasan ini terdapat hal-hal yang secara spesifik dapat dilihat sebagai hal yang mendasar dalam pengembangan pariwisata ditinjau dari sisi kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Beberapa hal yang mendasar dimaksud adalah berikut ini.

Kesiapan Lokasi Destinasi

Lokasi destinasi wisata sebagai ikon dari penyelenggaraan kepariwisataan merupakan sumberdaya yang perlu mendapatkan intervensi dari kebijakan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan di lapangan pada dokumen kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango bahwa selama ini bentuk intervensi sudah ada dalam poin-poin kebijakan.

Pelaksanaan intervensi tersebut telah sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Namun demikian bila ditelaah lebih mendalam pada situasi dan kondisi kegiatan kepariwisataan di lokasi destinasi menunjukkan adanya hal yang perlu disikapi dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud. Terdapat 5 unsur pokok yang harus ada di suatu tujuan wisata yaitu objek dan daya tarik wisata, prasarana wisata, infrastruktur, serta kondisi dari masyarakat atau lingkungan (Suwantoro, 2004). Penyiapan lokasi destinasi sebagai wujud pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan tidak secara simultan dilakukan dengan penyiapan peran dan perilaku masyarakat di lokasi wisata baik sebagai pelaku usaha di lokasi wisata maupun sebagai penduduk setempat.

Menurut Mamainan dan Sabatier dalam Wahab (Wahab, 2021) variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan meliputi; 1) kondisi sosial ekonomi dan teknologi; 2) dukungan publik; 3) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok; 3) dukungan dari pejabat dan atasan. Pendapat ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak terkecuali kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pelaksanaannya tidak secara parsial. Eksekusi di lapangan harus dipastikan dilakukan secara total sesuai tahapan dengan keterlibatan *stakeholder* sesuai tingkatan dan peranannya. Dalam pasal-pasal peraturan daerah maupun Peraturan Bupati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango sebenarnya sudah memberikan pedoman tentang pelibatan masyarakat. Namun pada pelaksanaannya masih sangat terbatas, sehingga hal ini berdampak pada efektifitas pelaksanaan kebijakan itu sendiri

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekaligus selaku pelaku usaha di tempat wisata, mengemukakan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam penyelenggaraan kepariwisataan sudah memberikan pembekalan-pembekalan kepada masyarakat baik sebagai penduduk maupun pelaku usaha. Namun jumlah masyarakat yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan pembekalan tersebut sangat terbatas. Hanya beberapa orang saja yang terpilih mengikuti kegiatan

pembekalan. Sehingga tidak semua orang mengetahui apa-apa yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan.

Kondisi yang demikian ini menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata. Menurut Meter dan Horn dalam Kadji 2008 bahwa keberhasilan implementasi kebijakan antara lain dipengaruhi kondisi lingkungan sosial (Kadji, 2008). Artinya bahwa pengkondisian lingkungan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan kepariwisataan atau sebaliknya penyesuaian kebijakan kepariwisataan dengan kondisi lingkungan masyarakat menjadi suatu hal yang penting agar kebijakan kepariwisataan dalam pengembangannya tidak menemui hambatan.

Struktur Pelaksana

Kebijakan kepariwisataan yang dilaksanakan di berbagai lokasi wisata di wilayah Kabupaten Bone Bolango memiliki kesamaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pada umumnya. Pada beberapa pasal di berbagai kebijakan kepariwisataan Pemerintah Kabupaten Daerah Bone Bolango menyebutkan adanya unit yang melaksanakan atau struktur pelaksana. Menurut Edward III tentang kriteria penting dalam implementasi kebijakan, terdapat empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi (Hidayat, 2021).

Struktur pelaksana sebagai operator pelaksana kebijakan merupakan dinamisor dalam aktifitas di lapangan. Penyelenggaraan kepariwisataan akan efektif apabila personil di lapangan memiliki struktur dan tata kerja yang terangkai berdasarkan hubungan dan tingkatan. Pasal-pasal dalam kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango secara eksplisit telah menyebutkan hal tersebut. Kondisi yang ditemukan di lapangan sesuai hasil wawancara dengan responden, struktur dan alur kerja yang ada belum bekerja maksimal yang disebabkan oleh belum adanya aktifitas yang secara rutin dilakukan dalam hubungan penyelenggaraan kepariwisataan. Hal ini membuat para pelaksana di lapangan menjadi bias dan kurang fokus pada hakikat kebijakan kepariwisataan.

Kondisi struktur pelaksana sebagaimana terurai di atas berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan kepada para wisatawan. Beberapa responden dalam wawancara mengungkapkan bahwa masyarakat yang tinggal di lokasi wisata maupun masyarakat pelaku usaha wisata belum menunjukkan struktur kerja penyelenggaraan kepariwisataan dengan baik. Penyelenggaraan kepariwisataan di lokasi wisata belum terstruktur sebagaimana mestinya. Lebih lanjut diungkapkan oleh responden selaku wisatawan bahwa masyarakat maupun pelaku usaha wisata dalam aktifitasnya kurang menunjukkan struktur kerja yang maksimal sebagai sebuah rangkaian pelayanan penyelenggaraan kepariwisataan.

Hasil penelitian serupa terkait tentang pengembangan pariwisata di Pantai Botutonuo menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam pembangunan pariwisata daerah diantaranya melalui 1) implementasi Sapta Pesona, 2) *Capacity Building* bagi masyarakat dalam hal ekonomi kreatif berbasis masyarakat dan pariwisata (Kusuma, Febiola, Arham, Muhamad Amir, Dai, 2020)

Keberlanjutan Kebijakan dalam Program

Pelaksanaan kebijakan dapat dilihat pada rencana program dan kegiatan yang dilakukan. Idealnya program dan kegiatan yang dilakukan bukan semata-mata menggugurkan kewajiban pencapaian tujuan kebijakan. Program dan kegiatan merupakan point penting dalam menjalankan kebijakan. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam dokumen kebijakan penyelenggaraan pariwisata telah menetapkan program dan kegiatan pada rencana induk. Hal ini merupakan keberhasilan dalam tataran rumusan kebijakan namun perlu diwujudkan di lapangan. Grindle dalam Tachjan (Tachjan, 2006) yang menyatakan bahwa *'Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect* (implementasi adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menerapkan sebuah program).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden, bahwa kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan selama ini terlalu dikonkritkan dalam naskah program maupun kegiatan. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan beberapa program maupun kegiatan tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini berakibat pada capaian kinerja kebijakan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bone Bolango telah dilaksanakan meskipun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kondisi yang demikian disebabkan oleh pelaksanaan kebijakannya masih terbatas pada kegiatan-kegiatan rutin administratif sehingga masyarakat sebagai stakeholder yang merupakan basis penyelenggaraan kepariwisataan belum banyak memberikan berkontribusinya. Untuk menjadikan masyarakat sebagai basis pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan, program, dan kegiatan tidak dikemas dalam bentuk rutin administrasi formil saja, tetapi juga merencanakan program dan kegiatan yang sifatnya banyak melibatkan masyarakat di lokasi destinasi wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16, No. 2, 253–270.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.685>
- Anggito & Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari (ed.)). CV Jejak.

- Elfianita, E. (2016). Pengembangan Pariwisata Berbasis Community Based Tourism di Desa Limbat Sari Kec. Bobot Sari kabupaten Purbalingga. *Jurnal Elektronik Mahasiswa pendidikan Luar Sekolah -S1*, 5 (3).
- Fujihasa, I. Gede Maharta, Ida Ayu Putri Widawati, N. M. E. M. D. (2022). Pembangunan Pariwisata di Desa Panglipularan melalui Peran Partisipasi Masyarakat, Kewirausahaan Sosial Berkelanjutan dan Inovasi. *Ekuita: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10 No. 2, 290–305.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2 No 1, 126–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>
- Kadji, Y. (2008). *Implementasi Kebijakan Publi dalam Perspektif Realitas*. Cahaya Abadi.
- Kusuma, Febiola, Arham, Muhamad Amir, Dai, S. I. S. (2020). Desain Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat di Pantai Botutonuo. *Aikos-Nomos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13 No. 2, 102. <https://doi.org/https://doi.org/10.37479/jkeb.v13i2.11351>
- Noerbella, D. (2022). Implementasi Program Kampus Mengajar Angkatan 2 dalam Meningkatkan Kompetensi Literasi dan Numerasi Peserta Didik. *Jurnal Cakrawala Pendas Universitas Pendidikan Indonesia*, 8 No. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jcp.v8i2.2087>
- Peraturan Bupati No 16 Tahun 2021 Tentang Kawasan Desa Wisata, (2021).
- Pramono, J. (2022). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo (ed.); Kedua). UNISRI Press.
- Qodriyatun, S. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimun Jawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah sosial*, 9 No. 2, 240–259. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.22212/aspirasi.v7i1.1084)
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022, (2022).
- Sinaga, Kariaman., E. al. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo*, VIII, No 1, 70–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.163>
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Andi.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. APII Bandung.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (F. Hutari (ed.)). Bumi Aksara. https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Kebijakan/mHorEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=solichin+abdul+wahab&printsec=frontcover

Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik* (S. Wahyono, Y. Setyorini, & I. Basuki (ed.); 12 ed.). Media Nusa Creative.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*. Kencana.